

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangannya secara mandiri. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah serta memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah (Mulyani dan wibowo, 2017). Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pembentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Secara utuh desentralisasi diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Desentralisasi mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatasi masalah di daerahnya dan mampu mengelola potensi yang dimiliki daerahnya secara optimal, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangannya (Anshori, 2019). Otonomi daerah diyakini menjadi cara terbaik dalam mendorong pembangunan daerah yang sebelumnya dilakukan dengan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa mempercepat dan mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing daerah (Prastiwi & Aji, 2020). Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat mengubah perilaku Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, efektif, dan profesional pada pelayanan kepada publik (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut yang tertuang dalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan suatu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja pemerintah, dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran atau belanja pada masa yang akan datang, sebagai penentu ukuran-ukuran standar untuk menilai kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, serta sebagai alat koordinasi bagi seluruh aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2018) .

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Kinerja yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap pertanggungjawaban berupa laporan APBD. Pengukuran kinerja keuangan dirasa sangat penting dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Anshori, 2019). Dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah (Maulina et al., 2021).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Namun kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Faktor-faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berdampak negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Fluktuasi ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah, sehingga menghambat pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan. Selain itu perubahan kebijakan dari pemerintahan pusat juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah, kebijakan yang tidak sinkron dengan kondisi daerah dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan dengan amanat desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mandiri. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar daerah di Indonesia terutama daerah tertinggal dan kepulauan, masih menghadapi keterbatasan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Akibatnya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Fenomena ini menjadi tantangan serius karena dapat melemahkan kemandirian keuangan daerah serta menimbulkan kesenjangan antara harapan dan realitas otonomi daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang menantang. Dengan terdiri atas 22 kabupaten/kota yang tersebar di berbagai pulau, NTT menghadapi permasalahan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya basis penerimaan daerah. Hal ini berdampak langsung pada kinerja keuangan pemerintah daerah, baik dalam hal kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, maupun kemampuan membiayai pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan pada faktor-faktor internal dalam memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti kualitas perencanaan anggaran, transparansi fiskal, dan pengawasan. Namun, dalam konteks daerah-daerah seperti di NTT, faktor eksternal justru memiliki peran besar yang belum banyak dikaji secara mendalam. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi dan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan transfer pemerintah pusat cukup fluktuatif selama periode 2020-2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT sempat mengalami kontraksi akibat pandemic Covid-19, namun kemudian secara bertahap kembali tumbuh positif, dan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam pada periode 2020-2024.

Tabel 1.1
Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer Pemerintah Pusat
Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y)	Transfer Pemerintah Pusat
2020	-2,22%	92,25%
2021	3,10%	95,66%
2022	3,45%	97,56%
2023	4,14%	89,43%
2024	3,66%	92,39%

Sumber: Badan pusat statistic (BPS) provinsi NTT dan APBD NTT

Pertumbuhan ekonomi provinsi NTT menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,22% akibat dampak pandemic covid-19. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi pemulihan, yaitu 3,10% pada 2021, 3,45% pada 2022, dan mencapai puncak di tahun 2023 sebesar 4,14%. Meskipun demikian pada 2024 laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 3,66%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemulihan, pertumbuhan ekonomi NTT masih berada pada kategori sedang atau tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sedangkan, transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber pendapatan utama bagi provinsi NTT. Persentase realisasi menunjukkan capaian yang relative tinggi meskipun mengalami fluktuasi. Tahun 2020 realisasi mencapai 92,25%, meningkat pada 2021 (95,66%) dan 2022 (97,56%). Namun, tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 89,43%, sebelum naik kembali pada 2024 dengan capaian 92,39%. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan fiskal daerah NTT masih sangat bergantung pada dukungan transfer pemerintah pusat.

Jika dilihat secara bersamaan, perkembangan pertumbuhan ekonomi dan transfer pemerintah pusat di Provinsi NTT memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020 ketika ekonomi mengalami kontraksi, realisasi transfer pusat masih cukup tinggi. Tahun 2021 hingga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan kenaikan persentase realisasi transfer. Namun, pada tahun 2023 meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai titik tertinggi, realisasi transfer justru turun secara signifikan. Sementara itu pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat dengan persentase realisasi transfer kembali meningkat menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa kondisi keuangan daerah NTT tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor eksternal, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kebijakan transfer pemerintah pusat. Namun meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif dan transfer pusat terus memberikan kontribusi signifikan, kinerja keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan transfer pemerintah pusat benar-benar mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi NTT.

Beberapa penelitian terdahulu dari Martantri, (2019) dan Amanda, (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan menurut Nurhayati dan Hamzah (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Martantri

(2019) dan Pranita, dkk (2024) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan transfer dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Menganalisis pengaruh kebijakan transfer dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini:

1. Manfaat Akademik
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pengembangan teori-teori atau ilmu pengetahuan terutama di bidang ekonomi, juga dapat menambah gambaran dan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh, faktor-faktor eksternal terhadap kinerja keuangan, terutama bagi Dosen, dan mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana.
 - b. Bagi pembaca dan penelitian lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap hasil penelitian lain yang telah dilakukan, serta dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur penelitian ini memberikan input atau masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh , faktor-faktor eksternal terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.